

PARADIGMA ETIKA PUBLIK DALAM KEARIFAN LOKAL *PELA*

John Christian Ruhlessin

Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) Ambon

Email: johnruhlessin1@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan menawarkan sebuah pemikiran tentang etika publik dengan menggali sumbernya dari salah satu kearifan lokal masyarakat Maluku, yakni Pela. Pengembangan perspektif etika publik dimaksudkan merefleksikan kepedulian dan keprihatinan mengenai konteks masyarakat yang aktual, yakni pluralisme, baik suku maupun agama. Dalam tulisan ini selain tinjauan pustaka, penulis juga menggunakan metode observasi partisipatif sebagai teknik pengumpulan data, sedangkan analisis data dilakukan selama peneliti melakukan penelitian, menerjemahkan, mendeskripsikan, maupun saat membaca dan menulis ulang hasil penelitian. Melalui tulisan ini penulis tiba pada temuan bahwa bukan saja agama-agama yang merupakan sumber nilai-nilai keutamaan (virtue), tetapi kearifan lokal (local genius) Pela pun memiliki nilai-nilai keutamaan itu, di antaranya persaudaraan, kesetaraan dan kebaikan. Penggalan dan penemuan nilai-nilai tersebut berkontribusi bagi pemikiran teoretik dan praksis etika publik, khususnya dalam konteks Indonesia yang pluralistik.

Kata kunci: *Pela, etika publik, pluralisme, kearifan lokal.*

Abstract

The writing aims to offer a thought about public ethics by digging its source from one of the local wisdom of the people of Maluku, namely Pela. The development of the public ethics perspective refers to the concern about the actual context of society, namely pluralism, ethnicity and religion. In this paper, in addition to literature review, the author also uses participatory observation methods as data collection techniques, while data analysis is done in the groove of attending, telling, transcribing, analyzing, reading and rewriting. Through this paper, the author arrives at the finding that

not only religions are the source of the values of virtue, but also local wisdom (local genius). Pela also has the values of the virtue, such as brotherhood, equality and goodness. The excavation and discovery of these values contribute to theoretical thinking and public ethical praxis, particularly in a pluralistic Indonesian context.

Keywords: *Pela, public ethics, pluralism, local wisdom.*

PENDAHULUAN

Konteks kehidupan sosial (di Indonesia) sejak awal merupakan suatu ruang publik yang plural. Corak pluralitas masyarakat tampak dalam berbagai segi kehidupan masyarakat, dan yang selalu menjadi masalah adalah pluralisme dalam bidang agama, etnis dan sub-etnis, juga faksi-faksi politik. Sebagai fakta masyarakat, pluralisme harus diakui dan diterima bukan sebagai suatu sikap taktis, tetapi suatu kesadaran yang eksistensial. Penolakan atau pengingkaran terhadap fakta itu sama saja dengan penolakan atau pengingkaran terhadap eksistensi masyarakat atau eksistensi kemanusiaan (Ruhlessin, 2005: 12; Ruhlessin, 2016: 273).

Masalahnya kemudian adalah, bagaimana kehidupan kolektif dan individu yang begitu bisa dibangun dalam kehidupan publik yang real? Bagaimana pula standar-standar moral yang disepakati sehingga memungkinkan kehidupan bersama dapat dibangun dengan baik? Bagaimana pula suatu arah dan perspektif kebaikan bersama dapat diletakkan, sehingga kehidupan bersama bisa berlangsung secara benar, baik, adil dan setara tanpa diskriminasi? Sebab ternyata, seseorang dalam perannya sebagai individu, adalah juga anggota dari suatu komunitas lokal, anggota kelompok sosial, anggota dari suatu kelompok agama yang memiliki standar-standar moral, sistem nilai yang partikular. Dalam situasi seperti itu, tuntutan untuk membangun kehidupan bersama tidak jarang menimbulkan konflik bahkan pertentangan-pertentangan nilai. Apa yang baik, benar, adil atau apa yang utama bagi suatu

kehidupan bersama pun sulit dirumuskan dan disepakati sebagai akibat pertentangan-pertentangan nilai itu.

Di sini muncul persoalan etis yang serius, bagaimana menata kepentingan-kepentingan kelompok di dalam sebuah ruang publik yang pluralistik? Apa perspektif etika yang dapat menolong kehidupan bersama dalam seting kehidupan publik yang pluralistik itu? Bagaimana pula individu-individu mengupayakan loyalitas dan tanggung jawab kepada kelompok-kelompok masyarakat dalam kehidupan publik yang pluralistik itu? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini merefleksikan dengan amat jelas, bahwa pluralisme tidak saja menjadi sebuah persoalan politik atau persoalan kebudayaan, tetapi ia malah menjadi sebuah persoalan etik yang serius, krusial dan penting.

Upaya mengintroduksi dan mendesain sebuah “etika publik” adalah suatu usaha kritis terhadap argumentasi-argumentasi etika yang ada selama ini. Mengapa bukan “etika sosial”, melainkan “etika publik”? Ini bukanlah sebuah fenomena teknikus *an sich*, juga bukan sebuah fenomena semantik, yang muncul sebagai sebuah permainan bahasa (*language game*). Ada persoalan epistemik yang mendasari introduksi “etika publik” dengan *Pela* sebagai dasarnya, merupakan suatu “*cognitive interests*” (Ingram, 1987:15). Artinya etika publik merupakan suatu mediasi terhadap kejadian-kejadian alamiah dalam masyarakat dengan logika perkembangan kebudayaannya sendiri.

Kehidupan publik ditandai oleh suatu kehidupan bersama sekelompok orang yang berkepentingan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Suatu kehidupan publik ditandai dengan adanya sekelompok orang yang diikat atau dikelompokkan secara bersama untuk suatu tujuan bersama. Kelompok-kelompok keagamaan, suku, lembaga-lembaga pendidikan, kelompok-kelompok politik adalah pusat-pusat pembentukan kehidupan publik. Kehidupan publik ditandai oleh kehidupan warganya sebagai suatu komunitas yang memiliki tujuan bersama. Gagasan suatu kehidupan publik menandai adanya partisipasi, emansipasi, interaksi timbal balik antar kelompok dalam ruang publik yang luas.

Kelihatannya para pemikir etik menghadapi kesulitan untuk menemukan fondasi etika publik. Gagasan-gagasan mengenai suatu fondasi etika secara universal dilihat sebagai sesuatu yang tidak memadai lagi. Tidak ada otoritas tradisi agama atau tradisi budaya yang dapat diterima secara universal. Begitu pula tidak ada dasar untuk suatu perspektif pemikiran etika publik. Sejauh itu, etika publik mencoba melakukan kritik terhadap persoalan-persoalan mendasar masyarakat, dan kritik itu melahirkan suatu perspektif baru dalam menyiasati dinamika perubahan itu sendiri. Ia dibangun dari anasir-anasir filosofis (tradisi), sebagai cara pandang masyarakat (Adeney, 1988:21).

Diskursus mengenai etika publik dilihat sebagai suatu arah baru refleksi etik, yang mencakup pemikiran kembali mengenai prinsip-prinsip tradisi, pengetahuan, hakikat manusia, dan perjanjian yang telah dibangun sebelumnya oleh para pemikir etik (Adeney, 1988: 25). Prinsip-prinsip itu kemudian diorganisasikan kembali terutama untuk mengakomodasi masalah fundamental yang dihadapi masyarakat di Maluku (Indonesia), seperti pluralisme agama, keragaman persepsi tentang kebenaran dalam masyarakat, perubahan dan perkembangan masyarakat, individualism, dengan bertolak dari tradisi *Pela* sebagai sebuah tradisi keadaban publik, dan dunia kehidupan, yang lahir dari paradigma komunitas masyarakat Maluku (Ruhlessin, 2005: 8)

Arah baru etika atau refleksi etik dengan demikian merupakan suatu konstruksi teoretik etik, yang diasumsikan mampu menjawab masalah-masalah kemanusiaan. Etika publik dipakai sebagai sebuah konsep teoritik untuk mendekati kembali persoalan-persoalan kemanusiaan kontemporer dalam ruang publik yang luas. Persoalan-persoalan fundamental kemanusiaan, antar lain, pluralisme masyarakat (agama), individualisme, perubahan masyarakat, kebebasan, demokratisasi, dan lain sebagainya. Dengan alasan-alasan yang dikemukakan itu, maka semakin jelas bahwa etika publik merupakan suatu arah baru pemikiran etik yang ingin dikembangkan daripada etika sosial (Ruhlessin, 2005: 8-9).

Tulisan ini dibangun dari sebuah studi terhadap berbagai data etnografi mengenai Maluku, yang secara lugas memaparkan realitas kebudayaan dalam hal ini *Pela*. Material kebudayaan dimaksud hidup dari generasi ke generasi sebagai suatu kumpulan kekayaan budaya (*cultural heritage*). Narasi *Pela* sebagai bagian kebudayaan memaparkan pengalaman sosial empiris dari zaman leluhur (*ancient*), sampai pada narasi kontemporer saat ini. Dalam kesatuan sebagai data kebudayaan, penelitian terhadap *Pela* dan pengembangan kerangka etika publik darinya mesti dilakukan terhadap ragam penceritaan *Pela* itu sendiri. Dari aspek naratif, ragam cerita *Pela* itu dapat berbentuk narasi personal, tetapi juga rekaman cerita yang diturunkan dari masa lampau dalam bentuk tradisi lisan. Dalam tulisan ini selain tinjauan pustaka, penulis juga menggunakan metode observasi partisipatif sebagai teknik pengumpulan data, sedangkan analisis data dilakukan selama peneliti melakukan penelitian, menerjemahkan, mendeskripsikan, maupun saat membaca dan menulis ulang hasil penelitian (Riessman:1993). Strategi ini bertumpu pada pengalaman (*experience*), sebagai dasar ontologis dari data *Pela* itu sendiri. Pengalaman merupakan *setting* terjadinya peristiwa dan aktivitas masyarakat ber-*Pela* di Maluku. Oleh sebab itu ia memuat di dalamnya peristiwa masa lampau, ketika *Pela* dikonstruksikan sebagai suatu sistem sosial, dan sistem etika, dan masa kini ketika *Pela* direvitalisasi sebagai satu jaringan makna sosial dan etika.

PEMBAHASAN

Perspektif Etika Publik Sebagai Dasar Tradisi *Pela*

Salah satu perkembangan spektakuler di abad ke-19 yang telah mentransformasi sejarah dunia adalah berkembangnya masyarakat industri-perkotaan (*urban industrial society*). Dalam realitas konteks seperti ini, terciptalah sebuah tatanan masyarakat baru yang muncul secara dramatik dalam sejarah dunia, dan menuntut pula sebuah sikap baru yang positif. Lahirnya *social ethics* pada pertengahan abad ke-19 menandakan suatu rangkaian pengembangan dalam pemikiran dan praktis sosial untuk

memengaruhi di antara iman dan masyarakat. Perkembangan kemudian dari arah etika sosial adalah dengan munculnya apa yang dikenal sebagai “*the global ethics*”. Terhadap hal itu, Hans Kung memberi konsentrasi pada sikap moral dasar manusia, yang di dalamnya diperlukan suatu sistem etika, termasuk teori filsafat atau teologi mengenai nilai-nilai dan norma yang secara langsung dapat memberi arah bagi proses-proses pengambilan keputusan tertentu (Kung, 1991: 25).

Kritikan bersama terkait itu bahwa, masalah etika sosial sudah mencoba masuk ke area-area partikular dari pergulatan kemanusiaan, seperti isu-isu gender, terorisme, dan lain sebagainya. Etika sosial sudah mencoba mendiskusikan suatu sistem keberadaan baru secara universal. Sebuah sistem pemberadaban yang diharapkan menjadi pandangan bersama dari masyarakat. Walau begitu fokusnya tetap pada sikap individu ke dalam atau terhadap institusi sosial, terutama terhadap kecenderungan munculnya suatu institusi baru yang tidak diharapkan bersama.

Apakah terdapat perbedaan antara yang disebut *public sphere* dan *private*? John Dewey (1954: 12-19) menegaskan bahwa tindakan-tindakan manusia mempunyai akibat atau konsekuensi-konsekuensi pada orang lain, dan akibat-akibat itu membawa kepada usaha-usaha pengaturan atau pengendalian tindakan-tindakan. Dewey menyebutkan dua konsekuensi atau akibat, yaitu akibat langsung dan tidak langsung yang memengaruhi keterlibatan seseorang.

Francis Adeney (1988: 15) membedakan antara “*citizenship ethics* dan *public ethics*. Ia menegaskan bahwa etika kewarganegaraan berbeda dari etika publik. Etika publik mendiskusikan tentang kebaikan dari komunitas dan pada apa gagasan tentang kebaikan itu didasarkan. Sedangkan etika kewarganegaraan mendefinisikan peranan warga dalam mencapai kebaikan itu di dalam masyarakat. Suatu etika publik yang spesifik menjelaskan mengenai kebaikan secara umum dan menggambarkan bagaimana kebaikan itu mungkin dapat dicapai, serta mengevaluasi pencapaian itu bagi

masyarakat secara keseluruhan. Etika publik memberi arah dan persetujuan atau kesepakatan yang dapat memonitor tindakan warga atau individu.

Robert Bellah (1970: 36) memahami dan menjelaskan tradisi sebagai suatu faktor yang sentral untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan masyarakat. Tradisi berfungsi sebagai kekuatan inklusif dan integratif. Penemuan kembali vitalitas tradisi Kitab Suci dan tradisi *Republik* di Amerika dapat meredakan atau mengurangi malah mencegah hilangnya konsensus karena diferensiasi dalam dunia modern, sehingga etik dapat difokuskan pada kebaikan bersama, dan bergeser dari etik yang bersifat individualistik. Dalam karyanya "*Tokugawa Religion: The Values of Pre-Industrial Japan*", Robert Bellah secara baik menjelaskan posisinya mengenai pentingnya tradisi. Dalam analisisnya mengenai masyarakat Jepang, ia menyatakan bahwa betapa kuatnya akar-akar budaya pra-modern. Religi Tokugawa, telah ikut membantu Jepang sebagai satu-satunya bangsa non-Barat, yang berhasil mentransformasikan dirinya menjadi bangsa industri yang modern (Bellah, 1992: xvii).

Masyarakat Jepang, menurut Bellah (1992: vxii), merupakan contoh atau model masyarakat yang begitu kuat memegang tradisi, sehingga universalisme etis pun ditolak. Kebanyakan orang Jepang masih terikat erat ke dalam kelompok-kelompok yang menuntut kesetiaan mereka daripada simpati terhadap orang dari luar kelompok. Kato Shuichi (1982: 9-14) menyebut fenomena ini dengan istilah "*competitive groupism*" atau "kelompokisme yang bersaing", dan Shimasono Susumu menamakannya "*group utilitarianism*".

Bellah menjelaskan, bahwa tujuan dari perilaku etis semacam itu jarang melampaui kepentingan kelompok. Keutamaan religi Tokugawa antara lain tampak jelas ketika terdapat tekanan pada kesetiaan kelompok di satu pihak dan pencapaian individual serta kolektif di pihak lain. Hal ini memungkinkan aksi kelompok yang kuat dan efektif. Bellah memosisikan pola ini pada struktur sosial, kepercayaan dan praktik-praktik masyarakat Jepang pada masa Tokugawa, dengan melihatnya pada kehidupan rakyat biasa. Egalitarianisme atau kesamaan kedudukan juga menjadi penting

dalam tradisi itu. Religi Jepang atau tradisi mempunyai kepedulian pada keselarasan antar manusia dan keselarasan dengan alam. Semuanya itu bermuara pada gagasan tentang hidup sebagai upacara, permainan, tarian, yang mengungkapkan rasa iba, sayang kepada semua yang ada di alam. Dalam karyanya itu, Bellah memberi perhatian pada dampak kepercayaan dan perilaku keagamaan bagi modernisasi dalam bidang sosial dan ekonomi. Termasuk kepeduliannya yang kuat akan keutuhan tradisi masyarakat (Bellah, 1992: xvii-xxi).

Sentralitas dari tradisi dalam pandangan Bellah juga berhubungan dengan teori sosialnya. Bellah melihat tradisi tidak hanya dalam arti spesifik, dengan referensi kepada tradisi Kitab Suci dan republik, tetapi dalam suatu cara yang dalam. Tradisi yang mengikat masyarakat bersama-sama, mengorganisasikan dan menata prioritas, memberi makna dan arah kepada aktivitas-aktivitas, mempersiapkan atau menopang hukum dan moralitas. Tradisi-tradisi keagamaan dan kebudayaan memainkan fungsi-fungsi vital agar masyarakat tetap hidup dan berkembang. Bagi Bellah masyarakat dan agama-agama berkembang. Suatu interdependensi dalam kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Kebutuhan-kebutuhan dasar ekonomi, kenyamanan atau keamanan, serta perlindungan harus saling mengisi dan terkait. Situasi baru harus dapat diadaptasi, diferensiasi-diferensiasi baru dibuat, dan kemudian diintegrasikan ke dalam institusi-institusi sosial. Apa yang disebut sebagai "*nexus*" dari stabilitas terletak dalam kepercayaan dan sistem-sistem nilai dari suatu kebudayaan yang memelihara dan mempertahankan maknanya. Tanpa tradisi, maka integrasi maknanya ke dalam institusi-institusi sosial masyarakat akan mengalami fragmentasi dan kurang berkembang (Ruhlessin, 2005: 117).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka perspektif etika publik yang dibangun dalam tulisan ini adalah mendeskripsikan apakah gagasan kebaikan dari masyarakat yang dibangun dari dalam paradigma komunitas dengan bersumber pada tradisi *Pela*, serta bagaimana pula gagasan kebaikan tadi dapat

dicapai di dalam masyarakat. Kemudian bagaimana pula gagasan-gagasan kebaikan pada *Pela* itu memberi persetujuan-persetujuan atau kesepakatan-kesepakatan moral yang memungkinkan tindakan-tindakan individu di dalam masyarakat. Bagaimana pula tindakan-tindakan individu atau interaksi antar individu dengan kelompok mempunyai akibat pada kebaikan bersama di dalam etos publik yang luas, demi kebaikan bersama masyarakat. Dari perspektif ini, menjadi jelas bahwa sandaran teoritik tentang tradisi perlu dikedepankan dalam membahas tentang *Pela*.

***Pela* dalam Konteks Sejarah Sosial**

Tinjauan terhadap perkembangan awal *pela* sesungguhnya mampu menunjukkan bahwa pengertian tentang istilah ini masih dipahami terbatas untuk menerangkan hubungan antar-saudara yang terbatas pada klan atau suku terkait. Hubungan antar-saudara merupakan bentuk paling dasar dari ikatan ini (*pela*). Latar belakang semacam itu menimbulkan persekutuan *pela* di mana jumlah anggota persekutuan dikenal dengan dua negeri (desa) atau multi-negeri (Ritiauw, 2008: 2; Tutuhaturunewa, 2010: 2; Malatuny dan Ritiauw, 2018: 36). Persekutuan *pela* yang terdiri dari dua negeri lebih banyak dipengaruhi persentuhan keduanya dalam konteks tertentu (perang, bencana, saling menolong) tanpa faktor kedekatan genealogi. Berbeda dengan itu, persekutuan *pela* multi-negeri cenderung memiliki latar belakang mengenai hubungan-hubungan genealogi. Frank Cooley (1987: 183) mendefinisikan *pela* sebagai ikatan persahabatan atau persaudaraan yang dilembagakan antara seluruh penduduk pribumi dari dua desa atau lebih. Ikatan tersebut telah ditetapkan oleh para leluhur dalam keadaan yang khusus dan menyertakan hal-hak serta kewajiban-kewajiban tertentu bagi pihak-pihak yang ada di dalamnya.

Terdapat anggapan yang berkembang dalam masyarakat (terutama para sejarawan setempat) bahwa terbentuknya ikatan ber-*Pela* di antara negeri-negeri Islam dan Kristen terjadi pada masa pra-Islam dan pra-Kristen, yaitu masa ketika masyarakat masih menganut agama suku setempat. Hal ini tidak sepenuhnya benar,

karena bahkan ikatan *Pela* yang dianggap paling tua, pertama, antara Batumerah dan Passo justru terjadi ketika Islam telah menyebar di kawasan ini yang telah berlangsung sejak dekade terakhir abad ke-15 atau dekade awal abad ke-16 (Lokollo, 1975: 5; Bakri, 2015: 56; Malatuny dan Ritiau, 2018: 37).

Dengan demikian jika yang dimaksudkan sebagai ikatan *Pela* dimulai dengan sejarah *Pela* Batumerah (Hatukau) dan Passo, maka anggapan tersebut tidak beralasan. Hal itu akan berbeda jika yang dimengerti sebagai ikatan *Pela* adalah konteks sosial ketika dengan *Pela* dimaksudkan sebagai inisiasi mengenai penerimaan individu dalam masyarakat suku dalam tradisi *kakean* (ritus pendewasaan seseorang). Di sini anggapan bahwa *Pela* terbentuk bahkan sejak pra-Islam dan pra-Kristen memiliki landasan historis. Harus diakui bahwa postur hubungan ber-*Pela* paling jelas diekspresikan lewat relasi-relasi di antara negeri-negeri Islam-Kristen. Orang-orang Muslim dan Kristen benar-benar sadar akan perbedaan-perbedaan di antara mereka yang menyentuh latar belakang keagamaan maupun latar historis yang sungguh-sungguh kelam tentang hubungan antara keduanya (Ruhlessin, 2005: 146; Malisngorar dan Sugiswati, 2017: 68). Namun mereka juga sadar bahwa *Pela* adalah “jembatan” yang mampu untuk menghubungkan keduanya dengan latar belakang kehadirannya yang paling otentik sebagai manusia. *Pela* merupakan cara yang paling manusiawi untuk membangun sebuah pemahaman kultural menyikapi perbedaan-perbedaan yang sangat kontras dan menajam dalam konteks sejarah perjumpaan antara keduanya. Ia merupakan tanda yang paling konkret tentang usaha (negeri) *Pela* Islam dan Kristen berjuang merumuskan sebuah nilai tentang keinginan untuk hidup bersama (Lawalata, 2017: 40).

Pela berfungsi dan berperan bagi kelangsungan suatu kesatuan masyarakat Ambon, menembusi batas-batas agama, Islam dan Kristen. *Pela* berfungsi tidak saja untuk mengikat orang-orang Muslim dan Kristen bersama-sama secara ekonomi melalui seperangkat hubungan timbal balik, tetapi juga merupakan pusat ritual dari suatu etnik keagamaan Ambon yang

mentransendensikan sekaligus mengintegrasikan Muslim dan Kristen, serta berfungsi sebagai basis identitas manusia Ambon (Bartels, 1977: 8). Bagi masyarakat Ambon, *Pela* merupakan tanda tentang kesadaran untuk mengorientasikan dan mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bersama. Dalam tanda itu terkandung sebuah perspektif tentang kesetaraan, pengakuan tentang martabat kemanusiaan bersifat universal. *Pela* mampu secara efektif menghilangkan kemungkinan terjadinya distorsi tentang makna kemanusiaan oleh sebab keinginan individu dan atau masyarakat untuk saling mendominasi dan menguasai. Is justru mendorong lahirnya sebuah basis untuk membangun perspektif etik yang relevan dan bersandar pada konteks kultural setempat.

Dalam konteks hubungan di antara anggota ber-*Pela*, motif-motif semacam itu tidak relevan dan tidak mendapat ruang untuk diaktualisasi. *Pela* memberi kemungkinan untuk hidup bersama dalam suatu kenyataan masyarakat beragama yang plural. Setidak-tidaknya *Pela* mampu memfasilitasi terjadinya sebuah komunikasi yang mempertemukan Islam dan Kristen bagi sebuah gagasan tentang pentingnya hidup bersama untuk saling mengerti dan menerima. Dalam aspek tertentu kedua hal itu telah menjadi semacam spirit yang merangsang Muslim dan Kristen menciptakan hidup yang lebih berkualitas.

Hal itu dapat terlihat dalam kenyataan terdapatnya negeri-negeri yang memiliki atau memutuskan menjalin hubungan *Pela* walaupun memiliki agama yang berbeda. Malahan ikatan itu terbangun dalam hubungan *Pela* keras atau *Pela* darah, di antara negeri-negeri beragama Islam dan Kristen. Sejarah telah menunjukkan terdapatnya hubungan seperti itu melalui *Pela* darah di antar Haria (Kristen) dengan Siri-Siro (Islam), atau *Pela* gandong antara Negeri Hualoy (Islam) dengan tiga negeri Kristen yaitu, Aboru, Booy dan Kariuw. Atau *Pela* keras antara Eri (Kristen di jajah Leitimor) dan Hitu Lama (Islam), Paso (Kristen) dan Batumerah (Islam). Maryam R.L Lestaluhu dalam tulisannya, "*Pela*" sebagai Perikat Kerukunan Masyarakat Maluku yang disampaikan

dalam Forum Diskusi Menuju Maluku Baru Pasca Kerusuhan, tanggal 27 Juli 2002, menyebutkan beberapa contoh *Pela gandong*, yang terikat hubungan genealogis antara Islam dan Kristen, yaitu Siri-Sori (Islam) dengan Haria (Kristen), *Pelauw* (Islam) dengan Titawae (Kristen), Morela (Islam) dengan Waai (Kristen), Hualoy (Islam) dengan Aboru (Kristen), Seith (Islam) dengan Ouw (Kristen). Batumerah (Islam) dengan Ema (Kristen), Asilulu (Islam) dengan Tiow (Kristen). Ia juga menyebutkan beberapa contoh *Pela* batu karang (*Pela* darah) yang diikrarkan dengan sumpah antara Islam dan Kristen, yaitu Batumerah (Islam) dan Passo (Kristen), Tulehu, Tial (Islam) dengan Paperu (Kristen), Ruhumoni (Islam) dengan Tuhaha (Kristen), Sepa (Islam) dengan Kamarian (Kristen), Wakasihi (Islam) dengan Hatu (Kristen), Tengah-Tengah (Islam) dengan Abubu (Kristen).

Aspek penghargaan dan penghormatan terhadap anggota *Pela* sangat kuat dipegang sebagai nilai yang menyatukan. Hal ini paling tampak dalam interaksi sosial kemasyarakatan maupun keagamaan. Kesadaran tentang perbedaan agama tidak dibatasi hanya dalam aspek kognitif masyarakat, namun juga bergerak ke dalam praksis kehidupan masyarakat. Konsep *Ale Na, Au Na* (kamu punya, saya punya) menjadi nilai yang mengantar pemahaman saling menghargai dan menghormati itu memiliki dasar tradisi. Realitas perbedaan agama sering kali justru makin memperkuat hubungan ber*Pela* antara anggota-anggota. Hal ini tampak misalnya pada komentar raja Batu Merah, Ar Tjerebon bahwa banyak orang yang tidak mengerti hubungan *Pela* di Maluku (Tengah). Mereka beranggapan perbedaan agama itu sesuatu yang sebenarnya merupakan kendala, padahal perbedaan agama itulah yang menjadi alasan mengapa kami saling mengasihi dan menghargai satu dengan yang lain. Sering kali kami lebih mengasihi saudara *Pela* daripada saudara kami sendiri (Ruhulestin, 2005: 149).

Hal ini sangat tampak dalam perilaku saudara *Pela*, yang sangat memerhatikan anggota *Pela*-nya yang berbeda agama, untuk menomorsatukan *pelaksanaan* aturan atau tatanan keagamaan yang diyakininya. Misalnya pada saat panas *Pela*, orang-orang Kristen

tidak boleh makan daging babi, ketika mengunjungi sekutu *Pela* Muslim. Sebaliknya, sekutu *Pela* Muslim akan memelihara acara dansa-dansa seperti Walls, Polonese, hanya untuk melayani kebutuhan sekutu *Pela* Kristen (Abdurahman, 1963:139-142).

Relasi-relasi di antara *Pela* Islam-Kristen ini tampak pula ketika para sekutu *Pela* mengirim perwakilan untuk menghadiri ibadah-ibadah keagamaan yang penting. Dalam *pelantikan* seorang Raja, atau acara-acara tradisional negeri, perayaan hari-hari besar keagamaan, sekutu *Pela* Islam tidak saja (secara eksternal) oleh yang Kristen diperkenankan hadir, tetapi lebih penting lagi adalah (secara internal) mereka merasa berhak untuk hadir dan mengikuti acara itu dalam gedung gereja. Hal yang sama pun terjadi ketika hari-hari besar keagamaan, sekutu *Pela* Kristen akan hadir dalam prosesi ritual keagamaan dan menempati posisi tertentu dalam ruang peribadahan di Masjid. Ia dapat berbentuk perwakilan oleh orang yang sudah dewasa dan akil balik menurut ukuran masyarakat maupun agama. Ketika terdapat seseorang dari negeri Hatu (Kristen) sakit, ia dapat pergi berobat kepada seorang "dukun" di Negerilima (Islam). Hal ini dapat terjadi karena keduanya merupakan sekutu *Pela*. Dalam konteks ber-*Pela*, praktik perdukunan tidak dilarang karena dihubungkan dengan peran para tete-nenek moyang (leluhur). Kepercayaan terhadap seorang dukun dikaitkan dengan kepercayaan kepada leluhur (Bartels, 1977:56-66).

Penghargaan yang tinggi terhadap sekutu *Pela*, bahkan telah terjadi sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Tidak dapat dipungkiri bahwa terjadi proses diskriminasi yang begitu sistematis terhadap orang Islam terutama dalam bidang pendidikan (persekolahan). Walaupun ada yang bersekolah, kemungkinan tersebut hanya dinikmati oleh para anak raja. Hal itu sangat berbeda dengan yang dialami oleh orang Kristen, terutama dari golongan *burger* (orang-orang bebas). Perilaku pemerintah kolonial semacam itu mengakibatkan kesempatan untuk bersekolah merupakan sesuatu yang paling berharga. Kerja sama di antara saudara ber-*Pela* tampak jelas pada waktu sekutu *Pela* Islam mengirimkan anak mereka untuk diangkat menjadi anak piara atau anak-angkat pada

keluarga dari sekutu *Pela* Kristen. Dalam kehidupan sehari-hari, sekutu *Pela* Kristen akan mendidik anak-piara Islam dalam kerangka sebagai seorang Islam, dengan menyediakan bagian tertentu dari rumah sebagai kamar pribadi sekaligus tempat beribadah. Termasuk menghindarkan anak tersebut dari makan dan menyentuh babi.

Sikap yang demikian dalam bentuk yang agak berbeda juga ditunjukkan pada masa kejadian Republik Maluku Selatan (RMS) di tahun 1950. Di sini tampak bahwa hubungan-hubungan ber-*Pela* Islam-Kristen sering kali diekspresikan pula dengan cara-cara yang dramatis. Misalnya pada saat perang Gurilla (gerilya) di Seram, terjadi ketegangan di antara tentara-tentara Republik Indonesia dengan tentara RMS, dengan negeri-negeri Muslim. Orang-orang RMS (kebanyakan tidak seluruhnya Kristen) mulai menyatakan rasa kebencian tidak hanya kepada orang-orang Muslim non-Ambon, tetapi juga di luar itu. RMS mencurigai negeri Muslim di sekitar Seram telah menolong musuh mereka (tentara Republik Indonesia). Kecurigaan dan kebencian itu mengakibatkan tentara RMS memutuskan untuk membunuh mesjid di Hualoy, salah satu negeri Muslim.

Akan tetapi salah satu dari anggota RMS, seorang laki-laki dari Kariuw, memanggil enam pemuda masing-masing yang berasal dari Booy, dan Aboru (yang juga tentara RMS), menjaga mesjid. Hal ini dilakukan karena negeri-negeri tersebut mempunyai hubungan *Pela* dengan Hualoy. Ketika pasukan gerilya tiba dengan maksud membakar mesjid, laki-laki Kariuw dan sahabat-sahabat *Pela*-nya menolak untuk membakar mesjid. Ia mengatakan bahwa mesjid ini tidak saja milik orang Hualoy, tetapi milik semua anggota *Pela*. Jika mesjid itu dibakar maka sekutu *Pela* merasa bahwa tentara gerilya juga telah membakar milik mereka. Bagi para sekutu *Pela*, mesjid itu bukan saja milik orang Islam Hualoy, tetapi juga milik sekutu *Pela*-nya yang beragama Kristen. Akibatnya ia menganjurkan agar tentara gerilya lebih baik kembali, dan mereka kemudian pergi dan tidak jadi membakar mesjid Hualoy (Bartels, 1977:105-110).

Benturan paling keras juga terlihat pada tahun 1970-an, terjadi perkelahian antara mahasiswa Institut Teologia dengan sekolah Muhammadiyah di kota Ambon. Latar belakang terjadinya insiden tersebut tidak jelas, namun diduga kuat terkait dengan soal-soal politik pada level provinsi. Ketika benturan terjadi, muncul solidaritas dari para pemuda Batumerah untuk membantu sesama mahasiswa Muslim untuk melawan mahasiswa Teologia. Saat itu terjadi pengumpulan massa di sekitar masjid Batumerah. Pada saat bersamaan terdapat juga aspirasi dari kalangan Batumerah sendiri yang menyatakan ketidaksetujuannya. Raja Batumerah kemudian memanggil para mahasiswa Muslim, dan mengatakan kepada mereka, “Kalau kalian mau menyerang orang Kristen, saya tidak akan berada di pihak kalian”. Pernyataan raja itu didorong oleh karena kesatuan ikatan *Pela* yang dibangunnya dengan Passo, negeri Kristen. Ia beranggapan bahwa penyerangan mahasiswa Muslim terhadap mahasiswa Teologia, itu sama saja dengan menyerang orang Batumerah (Ruhlessin, 2005: 208).

Konteks Maluku kontemporer yang tergambar melalui kerusuhan atau “tragedi kemanusiaan” pun memperlihatkan munculnya *Pela* sebagai kekuatan yang mampu mengeliminasi konflik yang makin mengarah pada dikotomi Islam dan Kristen. Posisi ikatan *Pela* sesungguhnya makin berfungsi ketika faktor agama yakni Islam dan Kristen secara gambling menunjukkan pengaruhnya untuk turut mendorong bangkitnya militansi kelompok dalam konflik. Seperti sudah dijelaskan di muka, bahwa tidak satu pun negeri ber-*Pela* terlihat dalam konflik, tetapi bersikap netral. Hal ini paling tidak memberi indikasi kuat bahwa ikatan ber-*Pela* berpotensi kuat mengeliminasi konflik yang terjadi pada taraf tertentu.

Keutamaan *Pela* Sebagai Dasar Etika Publik

Kajian ini bertumpu pada argumen epistemik bahwa *Pela* sebagai tradisi masyarakat di Maluku mengandung dasar dan dapat dijadikan dasar bagi etika publik. Di dalam *Pela* terdapat keutamaan-keutamaan seperti cinta kasih, persaudaraan, kerja

sama, kesetaraan dan kebaikan. Adat atau tata tertib *Pela*, yang mengatur hubungan ber-*Pela* dan bersumber dari mitos (leluhur) adalah pengetahuan yang muncul dari dalam komunitas. Sikap saling percaya, kesetaraan sebagai inti persaudaraan (*gandong*), satu rahim dalam pencitraan hubungan dan relasi-relasi ber-*Pela* lahir dari dalam paradigma komunitas. Inilah yang mengarahkan sikap dan tingkah laku seseorang dan komunitas untuk mencapai harmoni dan kesatuan secara total, antara masyarakat ber-*Pela* tetapi juga dengan leluhur mereka. Harmoni dan kekuatan ber-*Pela* dengan leluhur mereka dapat tercipta hanya ketika hubungan-hubungan ber-*Pela* itu tertata berdasarkan keutamaan-keutamaan, berdasarkan pengetahuan yang lahir dari paradigma masyarakat ber-*Pela* itu. Harmoni dan kesatuan itu adalah tujuan hakiki dari realitas masyarakat Maluku.

Aspek yang menonjol dari hubungan ber-*Pela* di Maluku hingga saat ini adalah kerja sama untuk membangun rumah ibadah (masjid atau gereja) milik anggota dari saudara *Pela*. Model kerja sama ini seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang biasa saja. Di balik akta ini ada latar belakang historis yang panjang terutama yang berhubungan dengan pola-pola relasi dan komunikasi yang tidak saling menghormati dalam konteks penjajahan. Faktor historis ini menjadi penting nilainya untuk menempatkan tindakan atau aktivitas-aktivitas kerja sama dan saling membantu anggota *pela* dalam membangun rumah ibadah sebagai materialisasi dan komitmen dari nilai persaudaraan yang lebih otentik. Tindakan-tindakan ini adalah aktivitas-aktivitas utama yang menjelmakan gagasan *gandong* atau hubungan bersaudara *pela* sebagai motif dasar etika ber-*pela*. Tindakan-tindakan ini kendati bersifat terbatas, dalam relasi-relasi ber-*pela*, tetapi mempunyai akibat-akibat secara tidak langsung bagi kesejahteraan masyarakat dalam ruang publik yang luas.

Kesadaran akan pentingnya makna kolektivitas manusia tersangkut paut dengan totalitas kehidupan dengan leluhur mereka. Dalam masyarakat di Maluku Tengah peneguhan adat sangat terkait dengan konsolidasi tatanan kosmik dengan leluhur

untuk mencapai keharmonisan dan kesatuan. Ketidakharmonisan atau ketidakseimbangan kosmos akan mengakibatkan malapetaka di dalam negeri atau di dalam keluarga, seperti sakit, penyakit, kematian, kebun tidak memberi hasil, dan sebagainya. Malapetaka-malapetaka itu dilihat sebagai kutukan leluhur, karenanya ritus menjadi penting, seperti panas *pela*, atau ritus cuci negeri. Ritus-ritus ini berfungsi mengkonsolidasi dan mengharmonisasikan keseimbangan mikrokosmos dan makrokosmos.

Selanjutnya, *pela* tidak hanya merupakan nilai simbolik. Ia juga bukan sekedar tempat pertemuan untuk menguji kesatuan etnik Maluku Kristen dan Muslim. Ia adalah sebuah tradisi keberadaban dan pemberadaban, suatu dunia kehidupan yang menjelaskan local genius masyarakat di Maluku. Sebagai tradisi, *pela* mengandung serangkaian aturan dalam sistem budaya yang dengannya kebijaksanaan-kebijaksanaan hidup dirasakan dan diwujudkan melalui suatu budaya. Sebagai tradisi, *pela* merupakan pranata budaya yang dapat dipahami dan dipercaya oleh mereka, karena ia memiliki kewibawaan dan sebagai pusat kultus. Sebagai tradisi, *pela* merupakan suatu prinsip etik yang penting.

Apa yang dilakukan Bellah (1970:146-167) dengan restorasi tradisi kitab suci dan republik sebagai suatu dasar dalam kehidupan publik Amerika, menekankan pentingnya restorasi tradisi komunal dan keagamaan yang memberi suatu *common base* untuk suatu etika publik. Ia memberi penekanan pada keberadaan individu sebagai *social self*, anggota dari suatu komunitas, pewaris sejarah dan kebudayaan yang mesti dipelihara melalui ingatan dan harapan. Masyarakat beragama dan sosial, harus menegaskan kembali peranan mereka dalam kehidupan publik, berbicara bahasa dari tradisi mereka. Tanpa titik tolak tradisi dari proses refleksi etik, maka kategori ataupun pikiran-pikiran akan menjadi hampa. Ia meyakini akan pentingnya suatu kebutuhan akan *moral belief* dalam masyarakat yang baik. Baginya makna yang penting yang dikejar kehidupan publik tidak lain adalah makna bersama dari suatu masyarakat. Ia menegaskan tidak ada agama umum, yang ada

adalah iman partikular yang dipegang oleh manusia dalam situasi-situasi konkret.

***Pela* Sebagai “Etika Publik” Masyarakat Maluku Kontemporer**

Permasalahan Maluku kontemporer meninggalkan suatu permasalahan tentang usaha menempatkan *Pela* dalam konteks hubungan Islam-Kristen pada masyarakat tersebut. Pemikiran semacam ini sebenarnya lahir dari konteks masyarakat yang memandang *Pela* dari perspektif kesejarahannya. Hal penting di sini adalah perspektif untuk melihat *Pela* tidak saja dalam konteks hubungan antar-manusia, tetapi juga melihatnya lebih jauh sebagai komunikasi yang memiliki perspektif etik, termasuk, mendorong ke arah upaya membangun hubungan Islam dan Kristen. Asumsi pokoknya ialah perspektif etik yang berlaku dalam suatu masyarakat selalu memiliki basis historis dan kebudayaan dalam konteks setempat.

Dari titik itu dapat dikatakan bahwa persoalan penting di Maluku bukan saja bagaimana membangun hubungan yang lebih konstruktif di antara Islam dan Kristen, tetapi jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana usaha untuk membangun hal itu di atas nilai-nilai kultural masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting karena secara praksis mendorong relevansi pemikiran tentang *Pela* sebagai kekuatan dari konteks kultural setempat dan untuk membangun sebuah etika publik.

Implisit dalam perspektif itu adalah jika *Pela*, dalam konteks Maluku kontemporer, hendak dipakai sebagai nilai-nilai bersama demi terciptanya suatu kehidupan yang lebih baik di masa kini, maka keinginan itu bukanlah suatu konsep berpikir yang tidak memiliki dasar historis. Justru pada saat muncul pertama kali, *Pela* sejak awal sudah dijadikan “etika publik” atau model komunikasi etis dalam konteks masyarakat saat itu. Dengan demikian, ketika *Pela* hendak dipakai sebagai basis membangun sistem berpikir etik di Maluku, ia bukan hal yang baru yang dipaksakan masuk ke dalam masyarakat setempat, melainkan menjadi bagian penting yang inheren dalam pengetahuan masyarakat dari waktu ke waktu.

Perkembangan pengertian *Pela* dari *Peia* hingga *Pela*, dari model *kekahen* hingga model masyarakat yang makin bergerak ke depan, justru menunjukkan bahwa *Pela* merupakan model yang selalu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat, secara kuantitatif maupun kualitatif. *Pela* menjadi kekuatan yang mampu mendorong terciptanya suatu hubungan yang lebih manusiawi di atas basis kultural masyarakat setempat. Ketika orang berbicara tentang membangun kehidupan masyarakat yang lebih manusiawi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etik bersama, maka yang dimaksudkan dengan kehidupan bersama adalah suatu kehidupan di antara masyarakat berbeda agama, antara Islam dan Kristen. Dengan begitu maka perlu dicari suatu bentuk hubungan yang dari dalamnya terkandung nilai kesetaraan yang secara kreatif memberi apresiasi satu terhadap yang lain sebagai individu yang bermartabat.

SIMPULAN

Salah satu tantangan agama-agama (Islam dan Kristen) di Maluku saat ini yakni, mencari dan menemukan *common ground* yang mampu menolong dan memberdayakan agama-agama melakukan tugas pemanusiaan dalam mengatasi krisis kemanusiaan bersama demi menciptakan masyarakat yang adil, damai, setara dan berkemakmuran. Studi ini menawarkan *Pela* sebagai *Pela* sebagai salah satu *common ground* yang paling manusiawi dan yang mampu meringkai hubungan Islam dan Kristen secara bersama-sama. *Pela* adalah cakrawala pengetahuan atau dunia kehidupan dan *local genius* yang lahir dari paradigma komunitas Maluku. Sebagai *common ground morality* atau akar moral bersama, *Pela* mendemonstrasikan dan menampilkan sebuah keunikan dan kekhasan moral sebuah komunitas yang partikular. Manusia dalam upaya merealisasikan kemanusiaannya selalu berkaitan dengan sosialitasnya, historisitasnya dan keagamaannya. Ia merupakan pemangku tradisi yang terlibat pula mengembangkannya. Keterikatannya dengan komunitas tertentu ditandai dengan keterikatannya terhadap moralitas komunitas

tersebut. Hidup yang bermakna berlangsung dalam sebuah konteks yang ditentukan oleh tradisi-tradisi tempat individu terlibat di dalamnya. Tradisi mengikat masyarakat bersama-sama, mengorganisasikan dan menata masyarakat, memberi makna dan arah kepada aktivitas-aktivitas dan tindakan-tindakan bermakna masyarakat serta menopang hukum dan moralitas.

Telaah terhadap permasalahan dalam tulisan ini telah berusaha membangun suatu perspektif pemikiran etik yang kontekstual dan dialogis dari dalam masyarakat. Selain itu juga untuk membuka wawasan baru, mengisi khazanah pemikiran etik sebagai cermin pola berpikir, memperkaya khazanah perbendaharaan agama dan kebudayaan, serta memperkaya bahasa etika dalam diskursus etik.

Pela sebagai narasi kehidupan masyarakat Maluku dapat menjadi titik tolak moral untuk memahami manusia dan eksistensinya. Ke-menjadi-annya sebagai manusia dengan kekhasan moralnya disituasikan oleh historisitasnya, religiositasnya dan kebudayaannya. Apa manusia itu, dan untuk apa ditentukan di dalam dunia kehidupan, yang memberi kepadanya keunikan dan kekhasan moral. Relasi ber-*Pela* bukan saja secara prinsip taat dan patuh kepada sejumlah aturan dan perintah, tetapi juga yang penting relasi-relasi itu bertumbuh dan berkembang dalam sebuah tatanan narasi kehidupan kolektif atau ber-*Pela*. Artinya sadar mengenai hakikat naratif dari keberadaan sebagai manusia ber-*Pela*. Tanpa kesadaran ini *Pela* akan mengalami erosi dan distorsi. Karenanya, etika ber-*Pela* dan atau *Pela* sebagai dasar etika publik adalah etika yang bersifat naratif.

Untuk memperkuat tradisi *Pela* ditentukan oleh pelaksanaan keutamaan-keutamaan yang relevan yang terdapat dalam *Pela*. Dalam konteks hubungan ber-*Pela*, keutamaan-keutamaan relevan misalnya, ke-salingpercaya-an, kesetaraan pada nilai dasar persaudaraan, kolektivitas. Keutamaan-keutamaan yang terbingkai pada *Pela* dipraktikkan dalam kegiatan-kegiatan yang bermakna. Kegiatan bermakna adalah suatu kegiatan yang mempunyai maksud sosial yang diatur dengan aturan formal atau tidak formal

dan merupakan satu kesatuan bermakna (Suseno, 2000: 203). Karenanya, tradisi *Pela* tidak hanya harus ditransformasikan, tetapi ia juga harus diorganisasi dalam lembaga-lembaga sosial dan keagamaan yang dapat melakukan kegiatan-kegiatan bermakna itu. Dengan melakukan hal itu, ada kontinuitas dari kisah yang belum selesai di dalam sejarah dan kreasi-kreasi yang dihasilkan oleh datuk-datuk (leluhur). Hal ini sesuai pula dengan apa yang ditegaskan oleh MacIntyre (1981: 175) bahwa hanya ada suatu keutamaan yang penting yaitu keutamaan bahwa orang mempunyai kesadaran memadai tentang tradisi-tradisi tempat ia menjadi partisipan atau yang menghadapinya.

Masyarakat Maluku dapat maju, hanya apabila masyarakat itu memelihara tradisi. Tradisi *Pela* lebih luas dari sekedar seni. Ia adalah dunia publik sebagai ruang ketika dunia pribadi dan sosial terlibat. Di dalamnya tampil sebuah misteri ketika individu-individu diterima dan diangkat sebagai anggota masyarakat. Wadah yang membawa misteri itu adalah sejarah dan kebudayaan masyarakat, dan tema sentralnya adalah tindakan-tindakan karya bermakna dan tujuan-tujuan yang mulia dari para pendahulu. Leluhur (datuk-datuk) telah meletakkan keutamaan-keutamaan penting yang terbingkai dalam hubungan ber-*Pela*, keutamaan-keutamaan dan kebaikan-kebaikan yang mengarahkan tindakan-tindakan yang baik demi kemaslahatan manusia. Temuan ini selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai sebuah rangsangan dan kontribusi dalam aras yang lebih luas, antara lain bagi bangsa Indonesia, yang secara sosiologis dan kultural sangat beragam, dan secara politik ideologis menerima realitas keragaman suku, ras, agama dan budaya, sembari membingkainya dalam spirit Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila sebagai dasar filosofisnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurachman, Paramita, et.al, 1963, *Peninggalan-peninggalan yang Berdiri Portugis di Ambon*, dalam C.P.F. Luhulima (ed.), *Bunga Rampai Sejarah Maluku Lembaga Penelitian Sejarah Maluku*, Jakarta.

- Adeney, Francis, 1988, *Citizenship Ethics: Contributions of Classical Virtue Theory and Responsibility Ethics*, Graduate Theological Union, U.M.I, Berkeley.
- Bartels, Dieter, 1997, *Guarding the Invisibles Mountain: Inter-Village Alliances, Religious Syncretism and Ethnic Identity among Ambonese Christians and Moslems in the Mollucas*, (Ph.D Dissertation), Cornell University, Ithaca.
- Bellah, Robert N. 1970, *Beyond Belief*, University of California Press, Berkeley and Los Angeles.
- _____, 1992, *Religi Tokugawa: Akar-akar Budaya Jepang*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____, 1992, *The Good Society*, Vintage Books, A Division of Random House, Inc, New York.
- Cooley, Frank. 1987, *Mimbar dan Takhta: Hubungan Lembaga-Lembaga Keagamaan dan Pemerintahan di Maluku Tengah*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Ingram, David. 1987, *Habermas and The Dialectic of Reason*, Yale University Press, New Heaven and London.
- Kato, Shuichi, 1982, *Competitive Groupism in Japan dalam The Japanese Challenge and American Respons: A Symposium, Research and Policy Studies, no.6, Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley.*
- Lawalata, Jandry Welmro, 2017, *Pela Gandong Sebagai Konseling Orang Basudara dan Agen Perdamaian Konflik Islam-Kristen di Ambon*, (Tesis), Magister Sosiologi Agama Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- Leirissa, R.Z., et.al., (ed.). 1987, *Maluku Tengah di Masa Lampau: Gambaran sekilas Lewat Arsip Abad Sembilan belas*, Arsip Nasional RI, Jakarta.
- Lestaluhu, Maryam. R.L., 2002, *Pela Sebagai Perekat Kerukunan Masyarakat Malulu*, Makalah disampaikan dalam Forum Diskusi Menuju Maluku Baru Pasca Kerusakan, Pokja Maluku, Jakarta.
- Lokollo, J.E. at.al., 1997, *Seri Budaya Pela-Gandong dari Pulau Ambon*, Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, Ambon.

- MacIntyre, 1981, *Alasdair, After Virtue*, University of Notredame Press., Notre Dame.
- Malatuny, Yakob Godlif dan Ritiauw Samuel Patra, 2018, Eksistensi *Pela Gandong* sebagai *Civic Culture* dalam Menjaga Harmonisasi Masyarakat di Maluku, *Sosio Didaktika* Volume 5 Nomor 2, p. 35-46.
- Malisngorar Julia dan Sugiswati Besse, 2017, *Pela Gandong sebagai Sarana Penyelesaian Konflik*, *Perspektif*, Volume 22 No. 1, p. 66-74.
- Ritiauw, Samuel P, 2008, *Peranan Kepemimpinan Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Kota Masohi Tahun 1999* (Tesis Magister), SPs UPI, Bandung.
- Ruhlessin, John, 2005, *Etika Publik: Menggali dari Tradisi Pela di Maluku Tengah*. UKDW Press: Salatiga.
- _____, 2016, *Mencari Cita Kemanusiaan Bersama, Pergulatan Keambonan dan Keindonesiaan*. UKSW Press, Salatiga.
- Suseno, Frans Magnis, 2000, *12 Tokoh Etika Abad ke-20*, Kanisius, Yogyakarta.
- Tutuhatumewa, A. Robert, 2010. *Budaya Pela di Maluku: Sebuah Model Komunikasi Antar Budaya dan Implikasinya bagi Pengolahan konflik antar masyarakat*, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial: Badati*. Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik UKIM, Ambon.